

Judul : Audit CSR kontraktor migas, Robert kirim surat ke BPK dan BPKP
Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Audit CSR Kontraktor Migas Robert Kirim Surat Ke BPK Dan BPKP



Robert J Kardinal

ANGGOTA Komisi X DPR Robert J Kardinal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dana Bagi Hasil Migas (DBH) dari LNG Tangguh.

Hal ini untuk memastikan keuntungan dari pengelolaan minyak dan gas (migas) di Blok Tangguh benar-benar tepat sasaran.

"Saya sebagai anggota DPR dari Papua Barat akan menggunakan kewenangan saya untuk meminta BPK dan BPKP melakukan audit investigasi terhadap dana CSR dan DBH," tegas Robert di Jakarta, kemarin.

Robert akan segera berkirim surat ke BPK dan BPKP perihal audit tersebut. Apalagi, dana dari CSR dan DBH yang berasal dari hasil pengerukan kekayaan alam di Blok Tangguh, belum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, khususnya di Bintuni. Malah jumlah

penduduk ekstern di Teluk Bintuni meningkat signifikan.

"Mereka (masyarakat adat) punya gas diambil di situ, tetapi masyarakat miskin ekstrem malah meningkat. Saya apresiasi temuan Filep Wamafma (Wakil Ketua Komite I DPD) dan saya meminta aparat penegak hukum melakukan tindakan penyelidikan awal," jelas politisi Golkar ini.

Melalui audit investigasi ini, lanjutnya, penyimpangan atas dana CSR dan DBH bagi masyarakat di Teluk Bintuni dapat dicegah. Sebab, saat Kabupaten Teluk Bintuni terbentuk, dana CSR dan DBH masih terbilang kecil. Namun, daerah ini mampu membangun banyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Mulai dari sekolah, rumah sakit hingga meningkatkan taraf pendidikan masyarakat asli Papua.

Tetapi di saat DBH sekarang jauh berkali-kali lebih besar, lanjutnya, daerah ini malah tertinggal.

"Banyak anak yang tidak menikmati sekolah, mengalami stunting dan sebagainya. Apakah ini salah program atau terjadi hal-hal lain, sehingga perlu diinvestigasi oleh BPK dan BPKP," ujarnya.

Selain itu, Robert juga menilai, masalah CSR dan DBH atas pengelolaan di Blok Tangguh ini juga perlu diselesaikan, mengingat Provinsi Papua Barat ini telah mengalami pemekaran menjadi Papua Barat Daya.

Dengan situasi tersebut, tentunya dana DBH yang diperoleh Papua Barat menjadi lebih besar lantaran 6 kabupaten yang sebelumnya menjadi bagian dari Papua Barat, menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Provinsi Papua Barat Daya. ■ KAL